

## **BAB IV**

### **ALASAN PRESIDEN LEE MYUNG BAK TIDAK MELANJUTKAN *SUNSHINE POLICY***

Terdapat beberapa faktor ataupun alasan yang membuat Presiden Lee mengganti Dan menghentikan *Sunshine Policy* sebagai kebijakan luar negerri Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. alasan ini tentunya yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan Dan keputusan yang diambil oleh Presiden Lee.

#### **1. Uji Coba Nuklir Korea Utara**

Nuklir memang sudah menjadi pembahasan yang cukup serius dalam dunia internasional. Kepemilikan nuklir oleh suatu negara dapat dijadikan sebagai pertahanan diri ataupun sebagai alat dalam menghadapi ancaman negara lain.ofensif ataupun defensif.

Akan tetapi dalam bentuk apapun Nuklir itu dimiliki, nuklir tetap menjadi perhatian khusus bagi dunia internasional karena sifatnya yang mengancam.terutama kepemilikan Nuklir oleh Korea Utara yang digunakan sebagai alat diplomasi yang tidak sehat dengan negara lain. Nuklir Korea Utara bukan saja mengancam Korea Selatan, tetapi juga mengancam sekutunya seperti Amerika Serikat. Nuklir Korea Utara merupakan salah satu dari sebagian nuklir yang amat dikhwatirkan Dan ditakuti oleh negara-negara.

Setelah tragedi perang di semenanjung Korea yang mengakibatkan pecahnya Korea menjadi dua bagian, diketahui Korea Utara berada di bawah

pengaruh Uni Soviet. Uni Soviet sangat mendukung bentuk pemerintahan dari Korea Utara yang memiliki ideologi sama.

Sejarah kepemilikan nuklir oleh Korea Utara sebenarnya dimulai pada tahun 1948 ketika Uni Soviet melaksanakan penelitian mengenai biji monazit di Korea Utara. Biji monazit itu sendiri diketahui merupakan bahan dasar dalam pembuatan nuklir, karena di dalam biji monazit terkandung Thorium Dan Uranium oksida yang bisa digunakan sebagai bahan pengganti Uranium.<sup>69</sup> pengembangan rudal atau nuklir Korea Utara Dan ekspor hwasong (kisaran 300 sampai dengan 500 kilometer) Dan Nodong (dengan jarak hingga 1.300 kilometer), rudal tersebut diadaptasi dari teknologi gerakan cepat yang paling aktif selama perang Iran-Iraq tahun 1980an.<sup>70</sup> Dan untuk pertama kalinya Korea Utara memulai proyek pengembangan Nuklir pada tahun 1986.<sup>71</sup>

Uni Soviet Dan Cina disebut memiliki peran dibalik kepemilikan Nuklir. Korea Utara yang memiliki kemampuan ekonomi yang tertinggal dari Korea Selatan membuat Uni Soviet Dan Cina bergerak untuk membantu Korea Utara dalam mengembangkan senjata Nuklir. Bantuan yang diberikan membuat Korea Utara berani maju untuk meningkatkan nuklirnya.

---

<sup>69</sup> . Winta Paramanandani, Pravidya, Thesis Sarjana: " Korea Utara Dalam Melanjutkan Program Pengembangan Senjata Nuklir Pada Tahun 2009" (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ,2010), 25.

<sup>70</sup> Alexander T.J. Lennon, "Contemporary Nuclear Debates", (A Washington Quarterly Reader 2002), Hal. 142

<sup>71</sup> Berlianto, "Sejarah Nuklir Korut, Dari Pembangkit Listrik Menjadi Senjata". Diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1138254/41/sejarah-nuklir-korut-dari-pembangkit-listrik-menjadi-senjata-1473474477> pada tanggal 24 Februari 2017, pukul 11:29.

Kim Il-sung alasan utama mengapa Korea tertarik untuk mengembangkan Nuklir. Kim Il-sung sendiri tertarik dengan Nuklir ketika menjelang berakhirnya perang dunia serta disusulnya pecahnya Korea. Pengoperasian reaktor nuklir dimulai di Yongbyon dengan kekuatan 50 megawatt. Sebelum melakukan pengoperasian Nuklir tersebut, Korea Utara terlebih dahulu melakukan konstruksi dengan bantuan dari Uni Soviet setelah perang di Semenanjung Korea.

Seiring berjalannya waktu, Korea Utara kian menunjukkan kekuatannya dengan melakukan uji coba nuklir. Uji coba nuklir pernah dilakukan pada tahun 2002 saat kedua Korea masih berada dalam upaya reunifikasi. Uji coba nuklir atau misil yang membuat Presiden Lee mempertimbangkan *Sunshine Policy* dilakukan pada bulan April dan Mei tahun 2009 tepat setelah setahun Presiden Lee menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Korea Utara beralasan bahwa uji coba nuklir tersebut sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan merupakan hak semua orang.<sup>72</sup> Susul dengan serangan ke pulau Yeonpyong serta serangan terhadap kapal Cheonan. Uji Coba nuklir yang dilakukan Korea Utara layaknya ejekan yang seakan-akan mengejek kesabaran serta reaksi Presiden Lee kala itu. Nuklir milik Korea Utara memang selalu menjadi perhatian khusus bagi pemimpin Korea Selatan, bahkan untuk pemimpin-pemimpin Korea Selatan sebelum Presiden Lee menjabat.

Nuklir Korea Utara dianggap satu-satunya yang memperlambat Reunifikasi kedua Negara. Hingga menimbulkan pertentangan di Korea Selatan.

---

<sup>72</sup> Korsel Ungkap Pemerasan Korut. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/957792/149/korsel-ungkap-pemerasan-korut-1422590792>. Pada tanggal 15 Februari 2017. Pukul 22:10 WIB

Korea utara juga sempat menyatakan keinginannya untuk kembali ke meja perundingan yang diikuti enam negara mengenai program senjata nuklirnya.<sup>73</sup>

Enam negara yang bergabung ialah Amerika Serikat, Jepang, Cina, Rusia dan dua Korea. Keinginan Korea Utara ini bertujuan untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Sudah sangat jelas jika permintaan Korea Utara mendapat pertentangan dari Korea Selatan sebelum Korea Utara meninggalkan nuklirnya. Amerika Serikat yang juga mendukung Korea Selatan enggan mengambil tindakan untuk kembali pada meja perundingan, karna melihat Korea Utara yang terus melakukan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajibannya. Jika hal tersebut sudah dipenuhi, maka dialog selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Presiden Lee. Serangan roket dari Korea Utara juga pernah dijatuhkan di lokasi dekat sekolah, yang mana pada saat itu sedang berlangsung proses belajar-mengajar.<sup>74</sup> Aksi yang membuat presiden Lee marah karna serangan dari Korea Utara yang semakin tidak memandang bulu. Bahkan tidak memperdulikan nyawa anak-anak. .

Di tahun 2010 bulan maret Korea Utara mengundang amarah Korea Selatan dengan melakukan serangan terhadap kapal Cheonan milik Korea Selatan yang menewaskan 46 orang.<sup>75</sup> Serta di tahun yang sama pada bulan november serangan di Yeonpyong yang merupakan pulau terluar di Korea Selatan. Serangan

---

<sup>73</sup> “Korea Selatan Minta Korea Utara Hindari Provokasi”, diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2012/01/02/118374950/korea-selatan-minta-korea-utara-hindari-provokasi> . Pada tanggal 19 Februari 2017. Pukul 11:00

<sup>74</sup> “Korsel Ancam Serang Korut”. Diakses dari <http://www.jpnn.com/news/korsel-ancam-serang-korut> . Pada tanggal 18 februari 2017. Pukul 10:42.

<sup>75</sup> . Jerry Guo, “North Korea's New Hard Line”. Diakses dari <http://europe.newsweek.com/north-koreas-new-hard-line-69801?rm=eu> . pada tanggal 27 Februari 2017. Pukul 9:30 WIB

tersebut memakan empat korban jiwa.<sup>76</sup> Serangan tersebut tentunya membuat rakyat Korea Selatan marah sehingga memaksa Lee Myung Bak untuk melakukan tindakan sebagai respon untuk Korea Utara. Opini publik mengenai nuklir menjadi pertimbangan Presiden Lee.

Presiden Lee merespon dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa membangun hubungan yang baik untuk reunifikasi Korea jika Korea Utara tetap bersikeras untuk menjaga nuklirnya. Presiden Lee juga menambahkan bahwa pihaknya telah membujuk Korea Utara untuk segera meninggalkan Program nuklirnya. Ini juga dapat memberi manfaat bagi Korea Utara secara domestik, yaitu mempertahankan rezim serta rakyatnya.

Presiden Lee terus mengusahakan agar dialog antar Korea tetap dijalankan untuk mengetahui keberlanjutan dari program nuklir tersebut serta mempertimbangkan kembali perundingan-perundingan yang telah disepakati dibawah *Sunshine Policy* untuk dibicarakan lagi pada kebijakan yang baru. Ini dilakukan agar komunikasi kedua negara tetap berjalan walaupun dalam keadaan konflik namun tetap ditangani dengan sikap dan kebijakan yang tegas.

Bantuan ekonomi serta isu nuklir Korea Utara sangatlah erat hubungannya. Karna bantuan yang diberikan bergantung pada kondisi nuklir. Karna Presiden Lee menerapkan kebijakan atas pemulihan hubungan kedua negara melalui kerjasama ekonomi. walaupun dirasa perkembangannya akan mengalami keterlambatan. Oleh karna itu Presiden Lee sangat berharap kepada Korea Utara

---

<sup>76</sup> Sukawarsini Djelantik, *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja sama, Dan Relasi Dan Antarkawasan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), Hal. 231

agar dengan tanpa paksaan sadar untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir demi hubungan Dan reunifikasi Korea. melihat bahwa pengembangan nuklir semakin giat dilakukan.

Upaya reunifikasi Korea serta perdamaian di Semenanjung Korea akan berjalan jauh lebih baik dari Prospek konflik senjata jika Korea mau membasmi nuklirnya. Jalan perdamaian seharusnya lebih dikembangkan Dan ditingkatkan lewat dialog-dialog serta upaya-upaya *Soft Diplomacy*, tanpa saling tebar kekuatan Dan saling menyerang dengan kebijakan yang dibentuk. Saling memahami Dan mengenal lebih dalam karakter dari masing-masing negara, apalagi tidak sulit untuk kedua Korea saling memahami karakter karna mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Hal itu dapat memperlancar proses perdamaian di Semenanjung korea. Masyarakat internasional pun seharusnya memberi perhatian pada isu nuklir Korea Utara yang memperlambat proses Unifikasi Korea. dukungan dari dunia internasional sangat perlu, tidak hanya diatasi dengan merubah kebijakan saja. Perlu diketahui bahwa ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea tidak saja memperlambat proses unifikasi Korea, namun juga dapat berdampak buruk bagi negara-negara lain di kawasan Asia Timur seperti Jepang Dan Cina. Pada awalnya sejumlah masyarakat Korea Selatan berpendapat bahwa seiring dengan meninggalnya Kim Jong-Il maka hilang pula isu nuklir Kore Utara serta akan semakin cepat proses reunifikasi.

Namun sayang, harapan tersebut tidak bisa diperhitungkan karna bagaimanapun juga, Nuklir Korea Utara masih tetap terus dikembangkan oleh

Kim Jong-Un. Intinya, kunci terbaik untuk tetap berdamai ialah menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara terlebih dahulu dengan cara apapun.

## **2. Isu Hak Asasi Manusia di Korea Utara**

Isu-isu Hak Asasi Manusia di Korea Utara sudah lama menjadi perbincangan. Dan menjadi isu yang seharusnya diatasi bersamaan dengan proses reunifikasi Korea. Isu Hak Asasi Manusia ikut menjadi perhatian Presiden Lee dalam membuat kebijakan. Korea Utara merupakan negara yang menganut sistem komunis, sehingga membuat rakyatnya banyak mendapat ketidakadilan dari penguasa Korea Utara. sehingga Presiden Lee menyuarakan pendapatnya tentang isu tersebut. Presiden Lee mengatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan harus memastikan bahwa isu-isu HAM di Korea Utara harus segera diatasi.<sup>77</sup> kejelasan dari sikap Presiden Lee terlihat pada maret 2008 ketika ia mempertimbangkan permintaan Korea Utara untuk makanan Dan pupuk.<sup>78</sup>

Pasca perang Korea, banyak warga Korea yang menjadi tahanan di Korea Utara. Diyakini bahwa ribuan warga Korea Selatan telah diculik selama perang. Besar harapan rakyat pada pemerintahan Lee untuk menempatkan Dan juga memprioritaskan pada penyelesaian isu HAM di Korea Utara. karna tidak dapat dipungkiri bahwa setidaknya ada sebagian warga mereka yang mendapat perlakuan tidak adil di Korea Utara.

---

<sup>77</sup> Jeong Jae Sung. "Analysis of Lee Myung Bak's Policy toward North Korea: Open North Korea through denuclearization and economic cooperation". Diakses dari <http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk00400&num=2561>. Pada tanggal 14 Februari 2017. Pukul 21:40

<sup>78</sup> Gunjan Singh. "South Korea Under Lee Myung Bak". Diakses dari [http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/SouthKoreaUnderLeeMyungbak\\_GSingh\\_220108](http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/SouthKoreaUnderLeeMyungbak_GSingh_220108). Pada tanggal 1 maret 2017. Pukul 1:00 WIB.

Korea Utara disebut-sebut melanggar hak-hak penduduknya. Dan tidak memberi kebebasan pada rakyatnya. Pemerintahan melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap penduduknya, kurangnya proses hukum yang berlaku Dan penyiksaan serta perlakuan buruk sering kali di terima oleh penduduk Korea Utara yang berada dalam tahanan. Bahkan Korea Utara tidak segan-segan menghukum warganya yang melakukan pencurian dalam skala kecil.

Hukuman yang diterima tidak sesuai dengan bentuk kejahatan. Bahkan tidak segan-segan untuk menghukum rakyatnya yang berusaha meninggalkan Korea Utara lewat jalur perbatasan. Untuk hal ini, bukan individu saja yang mendapatkan hukuman, namun orang-orang di perbatasan yang mencoba untuk meloloskan Dan membimbing warga yang ingin kabur juga mendapatkan hukuman. Untuk mereka yang melakukan prakti agama juga kerap mendapat hukuman yang tidak wajar. Segala sesuatu bentuk kejahatan yang tidak sesuai dengan ideologi Korea Utara mendapat hukuman. Beberapa kesaksian dari para pengungsi korea Utara mengatakan bahwa penyiksaan terhadap individu dalam kasus pidana Dan politik juga berlaku seperti penyiksaan kurang tidur, pemukulan dengan menggunakan batang besi atau tongkat. Bahkan ada yang di tendang Dan di tampar. Siksaan juga kerap kali di terima dari kaum perempuan seperti di perkosa Dan dijual. Menurut Kesaksian yang diberikan kepada kelompok hak asasi manusia Amnesty International, eksekusi umum kerap kali terjadi di kamp-kamp tahanan politik Korea Utara. selain diperbudak dengan diperintahkan untuk bekerja keras, mereka juga tidak mendapat cukup makanan untuk menambah tenaga mereka. apalagi dengan keadaan ruang tahanan yang begitun sempit yang



mengakibatkan para tahanan mati karna kekurangan gizi. Mereka-mereka yang berada di dalam tahanan memiliki kasus yang berbeda-beda, mulai dari yang diduga sebagai anti-pemerintah, sampai mereka yang tertangkap hanya karna ketahuan mendengarkan siaran Korea Selatan. Adapun kesaksian dari salah satu mantan narapidana yang mengatakan bahwa ia Dan ayahnya dipaksa untuk melihat eksekusi ibu Dan saudaranya. Pengalaman yang cukup menyakitkan untuk mereka. anak-anak yang berada di kamp-kamp juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak, mereka juga diperintah untuk bekerja keras hingga tak jarang banyak dari mereka yang pingsan. Bahkan jika anak-anak tersebut sakit ataupun tahanan lain nya sakit, mereka tidak diberi obat Dan makanan. Departement Luar Negeri AS menggambarkan bahwa HAM di Korea Utara sebagai kondisi yang menyedihkan.<sup>79</sup>

Kebebasan berbicara Dan beragama sangat dibatasi di Korea Utara. serta melarang rakyatnya berpergian tanpa izin Dan dokumen yang sah. HAM juga berlaku pada hak pangan rakyat Korea Utara. hal ini tercermindnegan banyaknya sumber daya negara yang dialokasikan hanya untuk kekuatan militer yang mengakibatkan rakyatnya mengalami kekurangan bahan pangan.

Menurut laporan Pemerintah, sekitar 200.000 warga Korea Utara pada saat itu dipaksa untuk bekerja di camp konsentrasi tanpa adanya pengadilan dari pemerintah. Dan Pyongyang menolak untuk menangani pemulangan tahanan

---

<sup>79</sup> Data diambil dari laporan Human Right watch atau yang juga disebut Amnesty Internasional yang kala itu melakukan penelitian di Korea. Untuk lebih jelas mengenai pelanggaran HAM di Korea Utara, silahkan kunjung laman ini <https://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/north-korea>.

Korea Selatan Dan orang-orang yang di duga diculik oleh Korea Utara.<sup>80</sup> Dan Pyongyang menolak untuk menangani pemulangan tahanan Korea Selatan Dan orang-orang yang di duga diculik oleh Korea Utara.<sup>81</sup>

Sudah dapat disimpulkan bahwa pemimpin Korea Utara tidak berpihak pada siapapun dalam menghukum kejahatan yang ada di Korea Utara. Termasuk juga dengan warga Korea selatan yang berada di Korea Utara. kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan untuk Korea Selatan. Memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk mencari tahu keberadaan rakyat nya serta melindungi rakyatnya dimanapun mereka berada.

Pemerintahan sebelum Presiden Lee tidak mengangkat isu HAM di Korea Utara karna takut akan berdampak pada kerjasama ekonomi yang sedang dijalin. Sehingga lebih mengutamakan kerjasama daripada harus mengurus HAM. Padahal penyelesaian HAM termasuk salah satu jalan menuju reunifikasi. Hal ini disampaikan juga oleh menteri Unifikasi bahwa pemerintahan sebelumnya tidak menjalankan perannya dalam menyelesaikan masalah Dan memperoleh mufakat dari masyarakat dalam hal reunifikasi.<sup>82</sup>

Pelanggaran HAM di Korea Utara sebenarnya sudah mulai diperhatikan oleh komunitas internasional 5 tahun sebelum Lee Myung Bak menjabat sebagai

---

<sup>80</sup> Jung Sung Ki, "Lee Myung-bak to Revise Sunshine Policy". Diakses dari [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2008/12/180\\_16071.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2008/12/180_16071.html). Dipetik pada tanggal 24 Desember 2016. Pukul 8:30 WIB

<sup>81</sup> Jung Sung Ki, "Lee Myung-bak to Revise Sunshine Policy". Diakses dari [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2008/12/180\\_16071.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2008/12/180_16071.html). Dipetik pada tanggal 24 Desember 2016. Pukul 8:30 WIB

<sup>82</sup> Kebijakan Pemerintahan Baru Korea Selatan Terhadap Korea Utara. diakses dari [http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news\\_issue.htm?no=12369](http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=12369). Pada tanggal 27 februari 2017. Pukul 9:43 WIB.

Presiden Korea Selatan. Sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan HAM di Korea Utara.

seperti mengadopsi serangkaian resolusi HAM yang dilakukan PBB untuk Korea Utara serta menugaskan seorang mata-mata atau pelapor khusus yang diperintahkan untuk melaporkan situasi HAM di Korea Utara. Bahkan LSM pun ikut serta mengambil peran dengan mencoba membawa pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il ke pengadilan kriminal Internasional untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negaranya.<sup>83</sup> Sayangnya ketika masyarakat internasional mencoba untuk menghentikan pelanggaran HAM di Korea Utara dengan berbagai cara, Korea Selatan sebagai negara satu nenek moyang tersebut memilih untuk diam Dan tidak melakukan apa-apa. Korea Selatan memilih untuk tetap berfokus pada kerjasama Dan timbal-balik di bawah payung *Sunshine Policy*.

Sebuah gebrakan baru untuk Korea Utara ketika mengetahui bahwa Presiden terpilih akan memfokuskan kebijakannya pada penyelesaian pelanggaran HAM di Korea Utara.

Untuk menindak lanjutinya, Presiden Lee merubah kebijakannya terhadap Korea Utara terutama dalam upaya reunifikasi Korea dengan strategi yang lebih keras. Isu HAM memang seharusnya segera di selesaikan. Korea Utara tidak bisa selamanya bertindak seperti ini. Jika terus dilanjutkan, maka akan banyak juga

---

<sup>83</sup> Yang Jung A, Loc.,It.

negara-negara lain yang akan ikut campur dengan permasalahan ini. Yang membuat reunifikasi semakin sulit untuk dicapai.